Kontribusi, Vol.7 No.1 November 2026
2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/Kontribusi.v7i1.1000

Pemanfaatan Kanal Digital untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa

Diterima:
23 September 2026
Revisi:
03 Oktober 2026
Terbit:
6 November 2026

[*]Nono Heryana, Rini Mayasari
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak— **Latar Belakang:** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola desa membuka peluang peningkatan partisipasi masyarakat melalui komunikasi terbuka dan mudah diakses. Namun, penyampaian aspirasi, pengaduan, dan keterlibatan dalam pembangunan masih memerlukan kanal digital yang dikelola secara sistematis. **Tujuan:** Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa melalui kanal digital sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. **Metode:** Kegiatan dilakukan melalui pelatihan komunikasi digital dan pendampingan perangkat Desa Mekarbuana dalam mengelola forum diskusi daring, grup komunikasi resmi, media sosial, dan fitur aspirasi pada website desa. Evaluasi dilakukan melalui monitoring, observasi, dan wawancara. **Hasil:** Kanal digital meningkatkan penyampaian masukan masyarakat sekitar 70%, sedangkan partisipasi dalam rapat desa meningkat dari 45% menjadi 78%. Sebanyak 82% responden menyatakan kanal digital mempermudah penyampaian pendapat dan keluhan. **Kesimpulan:** Pemanfaatan kanal digital memperluas akses komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan berkelanjutan diperlukan agar partisipasi digital terintegrasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.
Kata Kunci— Kanal Digital; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan Desa; Tata Kelola Desa; Teknologi Informasi

Abstract— ***Background:*** *The utilization of information and communication technology in village governance offers opportunities to enhance community participation through open and accessible communication. However, the submission of aspirations, filing of complaints, and engagement in development initiatives still require systematically managed digital channels.* ***Objective:*** *This initiative aims to increase community participation in village governance by establishing digital channels as a medium for communication between the village government and the community.* ***Methods:*** *The activity was carried out through digital communication training and by providing guidance to the officials of Mekarbuana Village on managing online discussion forums, official communication groups, social media, and an aspiration-submission feature on the village website. Evaluation was conducted through monitoring, observation, and interviews.* ***Results:*** *The digital channels led to a approximately 70% increase in the submission of community input, while participation in village meetings rose from 45% to 78%. Furthermore, 82% of respondents indicated that these digital channels made it easier to express their opinions and lodge complaints.* ***Conclusion:*** *The use of digital channels expands communication access and boosts community participation. Ongoing management is essential to ensure that digital participation is effectively integrated into the planning and evaluation of village development..*
Keywords— *Digital Channels; Public Participation; Village Governance; Village Management; Information Technology*

This is an open access article under the CC BY-SA License.

Penulis Korespondensi:

Nono Heryana,
Program Studi Sistem Informasi,
Universitas Singaperbangsa Karawang,
Email: nono@unsika.ac.id
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0003-4969-9353

Kontribusi, Vol.7 No.1 November 2026
ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital pada pemerintahan desa kini bergerak melampaui sekadar digitalisasi administrasi, mengarah pada penggunaan teknologi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kanal digital seperti website desa, media sosial, grup komunikasi daring, formulir aspirasi, dan forum digital memberi masyarakat akses informasi sekaligus ruang untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan usulan dengan lebih mudah. Dalam tata kelola desa, partisipasi masyarakat berperan besar karena pembangunan desa bergantung pada keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, dan tidak semata ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa. Penelitian mengenai tata kelola desa di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkaitan dengan kinerja pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan desa (Handayani et al., 2023). Studi mengenai tata kelola desa yang inklusif di Indonesia juga menunjukkan bahwa penerapan inclusive governance pada level desa desentralisasi masih menghadapi berbagai kendala dan menghasilkan capaian yang beragam antarwilayah (Annahar et al., 2023).

Meski partisipasi sudah lama menjadi agenda tata kelola desa, keterlibatan masyarakat dalam praktiknya belum selalu berjalan optimal. Partisipasi masih banyak terkonsentrasi pada forum tatap muka seperti musyawarah desa, rapat lingkungan, atau pertemuan formal lainnya, sehingga warga yang tidak berkesempatan hadir langsung cenderung tersisih dari proses tersebut. Putra (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola dan pembangunan desa dapat berhenti pada tingkat tokenism: warga diberi ruang menyampaikan aspirasi, tetapi tidak ada jaminan aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan atau tindak lanjut konkret. Artinya, penyediaan ruang partisipasi saja belum cukup; pemerintah desa memerlukan mekanisme komunikasi yang lebih mudah diakses, responsif, terdokumentasi, dan mampu menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses tata kelola desa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk memperluas ruang partisipasi tersebut melalui pendekatan digital participation. Dalam pendekatan ini, teknologi berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, tidak sekadar penyedia informasi publik. Pemanfaatan teknologi pada konsep smart village di Indonesia berkaitan dengan penggunaan sistem informasi desa, minat masyarakat terhadap teknologi, akses komunikasi, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan lokal, yang berarti keberhasilan desa digital lebih ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan pemerintah desa memanfaatkannya untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan daripada oleh infrastruktur teknologi semata (Susilowati et al., 2025). Tinjauan literatur sistematis mengenai transformasi digital desa juga mengonfirmasi tren peningkatan pemanfaatan teknologi digital pada level pemerintahan desa (Manapa Sampetoding & Er, 2024). Di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet di perdesaan

yang melampaui wilayah perkotaan turut mendorong pemerintah desa bertransformasi menuju smart governance (Oktarina et al., 2023). Praktik serupa pada program Lingkar Riang di Desa Manggis menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis aset lokal turut mendorong digitalisasi UMKM dan penguatan kapasitas komunikasi warga desa (Nazriana et al., 2026), sejalan dengan upaya digitalisasi promosi desa wisata yang terbukti meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola media digital secara mandiri (Sisephaputra et al., 2025).

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep inclusive governance, yang menempatkan aksesibilitas, kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan sebagai komponen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks desa di Indonesia, partisipasi masyarakat diperlukan sejak proses perencanaan, penyampaian aspirasi, dan perumusan kepentingan masyarakat, hingga pertanggungjawaban pembangunan, tidak terbatas pada tahap pelaksanaan saja. Ruang partisipasi yang lebih inklusif memungkinkan masyarakat dari berbagai kelompok memperoleh kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam tata kelola desa (Annahar et al., 2023). Praktik smart village governance di Desa Panggungharjo menunjukkan bahwa partisipasi warga turut memengaruhi keberhasilan penerapan teknologi pada tata kelola desa (Mutiarin & Iqbal, 2021), dan temuan lintas negara di Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa keberhasilan smart village bergantung pada sejauh mana kerangka tata kelola digital mengakomodasi partisipasi komunitas lokal (Endah et al., 2026). Dengan demikian, kanal digital dapat diposisikan sebagai instrumen yang memperluas ruang partisipasi konvensional, bukan menggantikannya.

Sejumlah penelitian dan kegiatan sebelumnya menunjukkan hubungan erat antara pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan partisipasi serta kualitas tata kelola desa. Anas et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan e-government pada pemerintahan desa berkaitan dengan upaya memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hajar dan Arma (2024) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital dapat menciptakan nilai publik melalui keterbukaan informasi dan pengembangan pelayanan pemerintahan desa berbasis web. Yaya dan Sukardi (2025) menemukan bahwa implementasi e-government dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, yang berarti integrasi teknologi dengan keterlibatan masyarakat turut menentukan peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Kajian jangka panjang mengenai e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia periode 2003–2020 juga memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ekosistem digital pemerintahan berkembang bertahap, seiring perluasan penggunaan platform elektronik oleh pemerintah (Wijaya et al., 2022).

ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

Kajian yang lebih baru menegaskan bahwa partisipasi digital tidak cukup dipahami sekadar sebagai tersedianya teknologi. Astawa et al. (2026) menunjukkan bahwa partisipasi publik digital dalam perencanaan pembangunan desa dapat berlangsung melalui keterbukaan informasi, konsultasi daring, mekanisme umpan balik interaktif, dan co-creation, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh infrastruktur, literasi digital, kepemimpinan, pemeliharaan platform, serta integrasinya dengan mekanisme formal perencanaan desa. Hasil tersebut diperkuat oleh Saadah et al. (2026), yang melalui pendekatan Participatory Action Research menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi desa dapat meningkatkan literasi digital, kapasitas operasional perangkat desa, dan kesadaran masyarakat terhadap layanan publik digital, meski keberlanjutan transformasi digital tetap membutuhkan komitmen manajerial, kepemimpinan, kepemilikan sumber daya, dan partisipasi yang tidak berhenti pada level normatif. Temuan serupa pada konteks internasional menunjukkan bahwa aktor kunci pembangunan desa memandang proyek smart village bermanfaat, tetapi implementasinya kerap terhambat oleh lemahnya kerja sama horizontal dan vertikal antaraktor (Hlaváček et al., 2023), sejalan dengan evaluasi strategi smart village yang juga mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi di lapangan (Renukappa et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan teknologi digital dan pemanfaatannya sebagai ruang partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Sebagian kajian terdahulu lebih banyak menyoroti digitalisasi desa dari sisi pelayanan administrasi, implementasi e-government, penggunaan Sistem Informasi Desa, atau peningkatan kapasitas perangkat desa, sementara pemanfaatan sejumlah kanal digital secara bersamaan sebagai sarana penyampaian aspirasi, keluhan, diskusi, dan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat masih perlu diperkuat pada level implementasi. Kesenjangan ini relevan terutama bagi desa yang sudah memiliki infrastruktur digital, tetapi belum mengoptimalkannya sebagai mekanisme partisipasi masyarakat. Kajian tata kelola e-government melalui Sistem Informasi Desa dari perspektif good governance, misalnya, menemukan bahwa keterbatasan kemampuan teknis operator desa berdampak pada rendahnya transparansi informasi yang tersedia bagi publik (Rodiyah et al., 2025). Studi lain mengenai adopsi sistem informasi desa di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan desa memerlukan keseimbangan antara sumber daya manusia, infrastruktur, dan layanan teknologi informasi (Sihotang et al., 2023).

Permasalahan serupa ditemukan pula di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Kegiatan pengabdian sebelumnya telah memperkuat kapasitas perangkat desa dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan Sistem Informasi Desa (Heryana & Mayasari, 2026), tetapi penguatan pada sisi aparatur ini masih perlu dilanjutkan dengan perluasan pemanfaatan teknologi di sisi masyarakat. Pada kegiatan sebelumnya, kanal

2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/Kontribusi.v7i1.1000

komunikasi digital sudah mulai dimanfaatkan melalui forum diskusi desa, grup komunikasi resmi, media sosial, dan fitur aspirasi masyarakat pada website desa. Kondisi ini menjadi dasar bagi kegiatan pengabdian yang lebih spesifik pada penguatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi kanal digital.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada orientasinya: kanal digital diposisikan sebagai mekanisme partisipasi masyarakat, bukan semata media penyebaran informasi atau alat administrasi pemerintahan desa. Kegiatan mengintegrasikan beberapa kanal komunikasi digital dan mengarahkan penggunaannya pada proses penyampaian aspirasi, keluhan, masukan, serta keterlibatan masyarakat dalam tata kelola desa, disertai pendampingan perangkat desa dalam menerima, mendokumentasikan, menindaklanjuti, dan mengelola komunikasi masyarakat. Dengan begitu, partisipasi digital tidak berhenti pada penyampaian pesan, melainkan menjadi bagian dari proses tata kelola pemerintahan desa, sejalan dengan temuan bahwa keberlanjutan transformasi digital desa membutuhkan partisipasi yang tidak berhenti pada level normatif (Saadah et al., 2026).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan PkM ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola Desa Mekarbuana melalui pemanfaatan kanal digital sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola kanal komunikasi digital, memperluas akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, dan keluhan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dan proses tata kelola desa, serta mendorong komunikasi dua arah yang lebih terbuka, responsif, dan terdokumentasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Keberhasilan kegiatan diharapkan tercermin dari meningkatnya penggunaan kanal digital oleh masyarakat serta meningkatnya keterlibatan mereka dalam proses komunikasi dan kegiatan pemerintahan desa.

II. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Metode kegiatan dikembangkan dari program pendampingan digitalisasi pemerintahan desa yang sebelumnya diterapkan melalui pelatihan terstruktur, praktik langsung, dan pendampingan penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) (Heryana & Mayasari, 2026), lalu difokuskan pada pemanfaatan kanal digital sebagai media komunikasi dua arah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa. Pada kegiatan sebelumnya, pelatihan dan pendampingan digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Pendekatan partisipatif ini relevan dengan implementasi sistem informasi desa sebab transformasi

ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

digital di tingkat desa membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah desa dan masyarakat (Saadah et al., 2026).

A. Subjek dan Sasaran Kegiatan

Subjek utama kegiatan adalah perangkat Desa Mekarbuana yang bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat, penyampaian informasi publik, dan pengelolaan media komunikasi desa. Sebanyak 15 perangkat desa dilibatkan dalam pendampingan ini, jumlah yang mengikuti kelompok peserta kegiatan penguatan kapasitas digital sebelumnya. Mereka dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam pengelolaan informasi, administrasi, pelayanan publik, serta interaksi dengan masyarakat.

Selain perangkat desa, masyarakat Desa Mekarbuana menjadi kelompok sasaran pemanfaatan kanal digital, berperan sebagai pengguna kanal komunikasi untuk memperoleh informasi, menyampaikan masukan, aspirasi, keluhan, serta mengikuti kegiatan pemerintahan desa. Kanal yang dimanfaatkan meliputi website desa, grup komunikasi resmi, media sosial, forum diskusi daring, serta fitur aspirasi masyarakat pada website desa. Beberapa kanal ini dimanfaatkan bersamaan agar partisipasi tidak hanya bergantung pada pertemuan tatap muka. Pada kegiatan sebelumnya, kanal semacam forum diskusi, grup resmi, media sosial, dan fitur aspirasi sudah diperkenalkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

B. Desain Kegiatan

PkM menggunakan desain partisipatif dengan pendekatan pelatihan, pendampingan, implementasi, dan evaluasi. Desain ini dipilih agar pengetahuan yang diperoleh perangkat desa benar-benar diterapkan dalam aktivitas komunikasi pemerintahan sehari-hari, bukan sekadar menjadi materi pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi lima tahap: (1) identifikasi kondisi awal dan permasalahan partisipasi masyarakat; (2) persiapan dan pemetaan kanal digital yang dapat digunakan; (3) pelatihan dan pendampingan perangkat desa; (4) implementasi kanal digital kepada masyarakat; dan (5) monitoring dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Tahapan ini konsisten dengan prinsip Participatory Action Research, yang menekankan keterlibatan aktor lokal dalam identifikasi masalah, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi perubahan (Saadah et al., 2026).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan desa tidak semata soal tersedianya teknologi; partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, penggunaan sistem informasi desa, dan akses komunikasi turut menentukan keberhasilannya. Karena itu, intervensi difokuskan bukan pada penyediaan teknologi baru, melainkan pada optimalisasi kanal yang sudah dapat digunakan pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan (Susilowati et al., 2025). Hal ini sejalan dengan

2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/Kontribusi.v7i1.1000

temuan bahwa literasi digital dan penggunaan teknologi berbasis mobile berpengaruh terhadap pemahaman aktor pemerintahan mengenai konsep smart village (Dirgatama et al., 2024).

C. Tahapan Pelaksanaan PkM

Tahap pertama adalah identifikasi kondisi awal. Tim melakukan observasi terhadap pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, termasuk mekanisme penyampaian informasi, aspirasi, keluhan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa. Tahapan ini digunakan untuk menentukan hambatan utama pemanfaatan media digital dan memilih kanal yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tahap kedua adalah persiapan kanal digital. Tim bersama perangkat desa mengidentifikasi dan mengoptimalkan media yang tersedia, yaitu website desa, media sosial, grup komunikasi resmi, forum diskusi daring, dan fitur aspirasi masyarakat, dengan fungsi yang dibedakan agar tidak tumpang tindih: website untuk penyampaian informasi publik dan dokumentasi kegiatan, media sosial untuk diseminasi informasi secara cepat, grup komunikasi untuk komunikasi langsung, dan fitur aspirasi untuk menampung usulan serta pengaduan masyarakat.

Tahap ketiga adalah pelatihan dan pendampingan perangkat desa, dengan materi mencakup pengelolaan komunikasi digital, penyusunan informasi publik, pengelolaan aspirasi masyarakat, etika komunikasi digital, dokumentasi masukan masyarakat, serta mekanisme tindak lanjut. Metode yang dipakai meliputi penjelasan materi, demonstrasi, praktik langsung, simulasi komunikasi, dan pendampingan. Pendekatan praktik langsung ini sebelumnya sudah digunakan dalam kegiatan digitalisasi Desa Mekarbuana dan menghasilkan peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi informasi.

Tahap keempat adalah implementasi kanal digital kepada masyarakat. Perangkat desa mulai memakai kanal yang sudah disiapkan untuk menyampaikan informasi sekaligus menerima aspirasi dan umpan balik warga. Masyarakat didorong menggunakan media ini sebagai alternatif dan pelengkap forum tatap muka, sementara aspirasi yang masuk dicatat dan dikelompokkan berdasarkan jenis kebutuhan agar bisa ditindaklanjuti perangkat desa.

Tahap kelima adalah monitoring dan evaluasi, yang mencakup aktivitas penggunaan kanal digital, jumlah masukan masyarakat, keterlibatan warga dalam forum desa, dan persepsi masyarakat terhadap kemudahan menyampaikan aspirasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan indikator partisipasi sebelum dan setelah pemanfaatan kanal digital.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui empat teknik: observasi, dokumentasi, monitoring kanal digital, dan wawancara atau survei kepada peserta kegiatan. Observasi dipakai untuk mengidentifikasi perubahan pola komunikasi dan keterlibatan masyarakat, sedangkan dokumentasi mencatat pelaksanaan kegiatan serta aktivitas perangkat desa dalam mengelola kanal digital.

ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

Monitoring kanal digital dipakai untuk melihat perkembangan jumlah aspirasi, masukan, serta interaksi masyarakat melalui media yang digunakan. Wawancara dengan perangkat desa mengungkap perubahan dalam proses pengelolaan komunikasi masyarakat, sementara survei kepada masyarakat mengukur kemudahan akses komunikasi dan persepsi mereka terhadap saluran aspirasi digital. Data yang dikumpulkan difokuskan pada tiga indikator utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Utama

Indikator	Pengukuran	Sumber Data
Partisipasi melalui kanal digital	Perubahan jumlah warga yang menyampaikan masukan melalui media digital	Monitoring kanal digital
Partisipasi dalam kegiatan desa	Persentase keterlibatan masyarakat dalam rapat atau kegiatan desa sebelum dan setelah kegiatan	Dokumentasi dan observasi
Kemudahan penyampaian aspirasi	Persentase masyarakat yang menyatakan lebih mudah menyampaikan pendapat dan keluhan	Survei/wawancara masyarakat

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif komparatif, dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah implementasi kanal digital. Perubahan tingkat partisipasi dihitung menggunakan persentase perubahan sebagai berikut:

$$P = \frac{X_{sesudah} - X_{sebelum}}{X_{sebelum}} \times 100\%$$

dengan P merupakan persentase perubahan partisipasi, $X_{sebelum}$ merupakan nilai indikator sebelum intervensi, dan $X_{sesudah}$ merupakan nilai setelah intervensi.

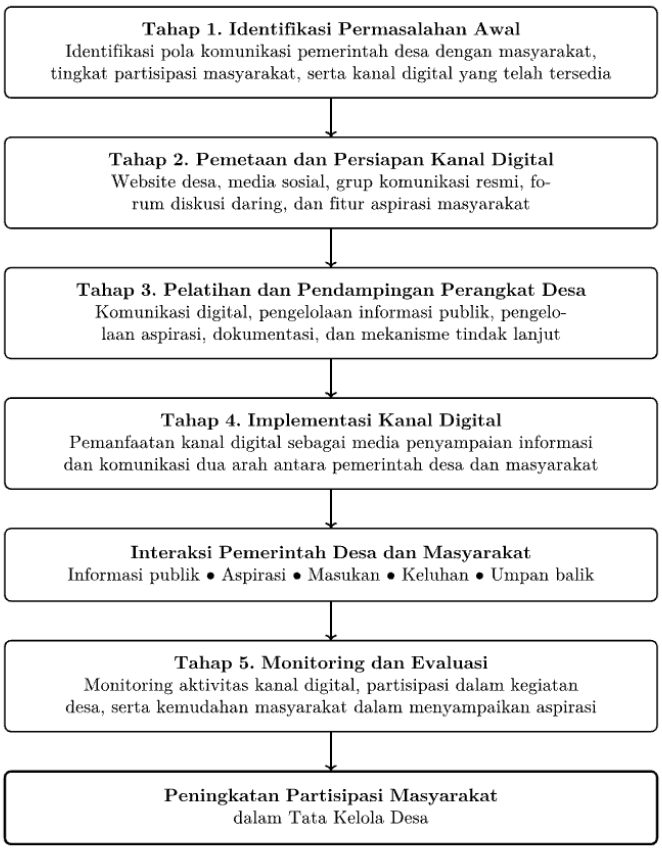
Untuk indikator partisipasi rapat desa, analisis dilakukan dengan membandingkan persentase keterlibatan masyarakat sebelum dan setelah program. Data persepsi masyarakat terhadap kemudahan komunikasi dianalisis berdasarkan distribusi persentase jawaban responden. Hasil wawancara dan observasi digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan perubahan kuantitatif yang ditemukan.

Desain analisis ini dipilih karena kegiatan PkM berorientasi pada evaluasi perubahan yang terjadi setelah pendampingan dan bukan pada pengujian hubungan kausal melalui eksperimen terkontrol. Oleh sebab itu, hasil disajikan dalam bentuk jumlah, persentase, perubahan persentase, serta deskripsi temuan lapangan.

F. Diagram Alur Pelaksanaan PkM

Tahapan pelaksanaan PkM yang telah diuraikan sebelumnya dirangkum dalam sebuah diagram alur untuk memperjelas keterkaitan antar tahap, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/Kontribusi.v7i1.1000



Gambar 1. Diagram Alur Pemanfaatan Kanal Digital untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan berjalan mulai dari identifikasi kondisi awal, penguatan kapasitas pengelola kanal digital, implementasi kepada masyarakat, hingga evaluasi perubahan partisipasi. Model pelatihan dan pendampingan ini merupakan pengembangan dari kegiatan PkM sebelumnya di Desa Mekarbuana, yang memakai pelatihan, praktik, dan pendampingan sebagai mekanisme peningkatan kapasitas perangkat desa (Heryana & Mayasari, 2026).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pemanfaatan kanal digital memperluas ruang komunikasi antara pemerintah Desa Mekarbuana dan masyarakat. Kanal yang digunakan meliputi website desa, media sosial, grup komunikasi resmi, forum diskusi daring, dan fitur aspirasi masyarakat. Selain menjadi media penyampaian informasi, kanal-kanal ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan aspirasi kepada pemerintah desa.

Kontribusi, Vol.7 No.1 November 2026
ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

Temuan PkM ini adalah tiga perubahan utama, yaitu meningkatnya penyampaian masukan melalui kanal digital, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rapat desa, dan meningkatnya kemudahan masyarakat menyampaikan aspirasi. Berdasarkan hasil monitoring dan wawancara, jumlah warga yang memberikan masukan melalui kanal digital naik sekitar 70%. Partisipasi dalam rapat desa naik dari 45% menjadi 78%, sementara 82% responden menyatakan penyampaian pendapat dan keluhan menjadi lebih mudah setelah kanal digital dimanfaatkan.

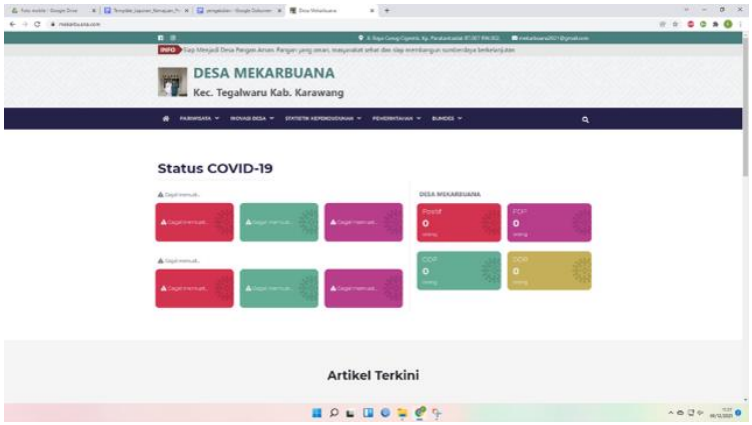


Gambar 2. Dokumentasi Pelatihan Pemanfaatan Kanal Digital kepada Perangkat Desa Mekarbuana

Gambar 2 memperlihatkan dokumentasi pelaksanaan pelatihan pemanfaatan kanal digital kepada perangkat Desa Mekarbuana, sebagai bukti kegiatan pendampingan yang dilakukan sebelum implementasi kanal digital kepada masyarakat.

A. Pemanfaatan Kanal Digital sebagai Media Partisipasi

Pemanfaatan kanal digital dilakukan dengan menyesuaikan fungsi setiap media. Website desa berfungsi sebagai media informasi dan dokumentasi publik, media sosial digunakan untuk penyebaran informasi secara cepat, grup komunikasi resmi digunakan untuk komunikasi langsung, sedangkan forum dan fitur aspirasi digunakan untuk menampung pendapat serta masukan masyarakat. Gambar 3 menunjukkan tampilan portal website Desa Mekarbuana yang menyediakan informasi layanan, data kependudukan, dan publikasi kegiatan desa secara daring sebagai bukti implementasi kanal digital tersebut.



Gambar 3. Portal Website Desa Mekarbuana sebagai Kanal Informasi dan Dokumentasi Publik

2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/Kontribusi.v7i1.1000

Portal tersebut merupakan satu dari lima kanal digital yang dioptimalkan dalam kegiatan ini. Tabel 2 merangkum kelima kanal digital yang dimanfaatkan beserta fungsi utama dan bentuk partisipasi yang dihasilkan.

Tabel 2. Pemanfaatan Kanal Digital dalam Tata Kelola Desa

No.	Kanal Digital	Fungsi Utama	Bentuk Partisipasi
1	Website desa	Informasi publik dan dokumentasi	Mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi
2	Media sosial	Penyebaran informasi kegiatan desa	Komentar, tanggapan, dan berbagi informasi
3	Grup komunikasi resmi	Komunikasi langsung	Pertanyaan, diskusi, dan penyampaian keluhan
4	Forum diskusi daring	Media diskusi masyarakat	Usulan dan pendapat
5	Fitur aspirasi	Media formal penyampaian aspirasi	Masukan, pengaduan, dan rekomendasi

Penggunaan beberapa kanal sekaligus memberi masyarakat alternatif untuk memilih media komunikasi yang paling mudah mereka akses, mengingat karakteristik penggunaan teknologi warga tidak seragam. Sebagian lebih nyaman memakai media sosial atau grup komunikasi, sedangkan sebagian lain membutuhkan media yang lebih formal melalui website desa. Secara substantif, pemanfaatan multi-kanal tersebut memperluas fungsi teknologi dari sekadar media informasi menjadi instrumen partisipasi. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat.

B. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat setelah optimalisasi kanal digital. Perubahan paling jelas terlihat pada partisipasi rapat desa, yang naik dari 45% menjadi 78%, atau meningkat 33 poin persentase. Jumlah warga yang memberikan masukan melalui media digital juga naik sekitar 70%, dan 82% responden merasa lebih mudah menyampaikan pendapat dan keluhan kepada pemerintah desa. Capaian tersebut dirangkum pada Tabel 3.

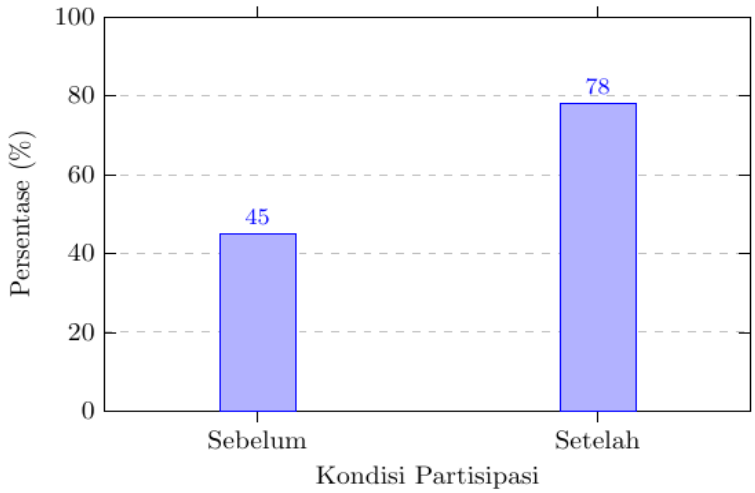
Tabel 3. Hasil Evaluasi Partisipasi Masyarakat

Indikator	Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah	Hasil
Partisipasi dalam rapat desa	45%	78%	Naik 33 poin persentase
Masukan melalui kanal digital	Kondisi awal	Meningkat	Naik sekitar 70%
Kemudahan penyampaian aspirasi	Tidak dilaporkan secara spesifik	82% responden menyatakan lebih mudah	82%
Interaksi melalui kanal digital	Terbatas	Lebih aktif	Meningkat

Temuan ini menunjukkan bahwa kanal digital turut meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa secara langsung, tidak hanya partisipasi daring. Partisipasi digital dengan

Kontribusi, Vol.7 No.1 November 2026
ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

demikian tidak menggantikan musyawarah atau rapat desa, melainkan memperkuat mekanisme partisipasi yang sudah ada.



Gambar 4. Perubahan Partisipasi Masyarakat dalam Rapat Desa

Gambar 4 memperlihatkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rapat desa setelah pemanfaatan kanal digital. Angka 45% sebelum kegiatan meningkat menjadi 78% setelah implementasi, menunjukkan bahwa kanal digital dapat menjadi penghubung antara komunikasi daring dan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pemerintahan desa.

C. Perubahan Pola Komunikasi Pemerintah Desa dan Masyarakat

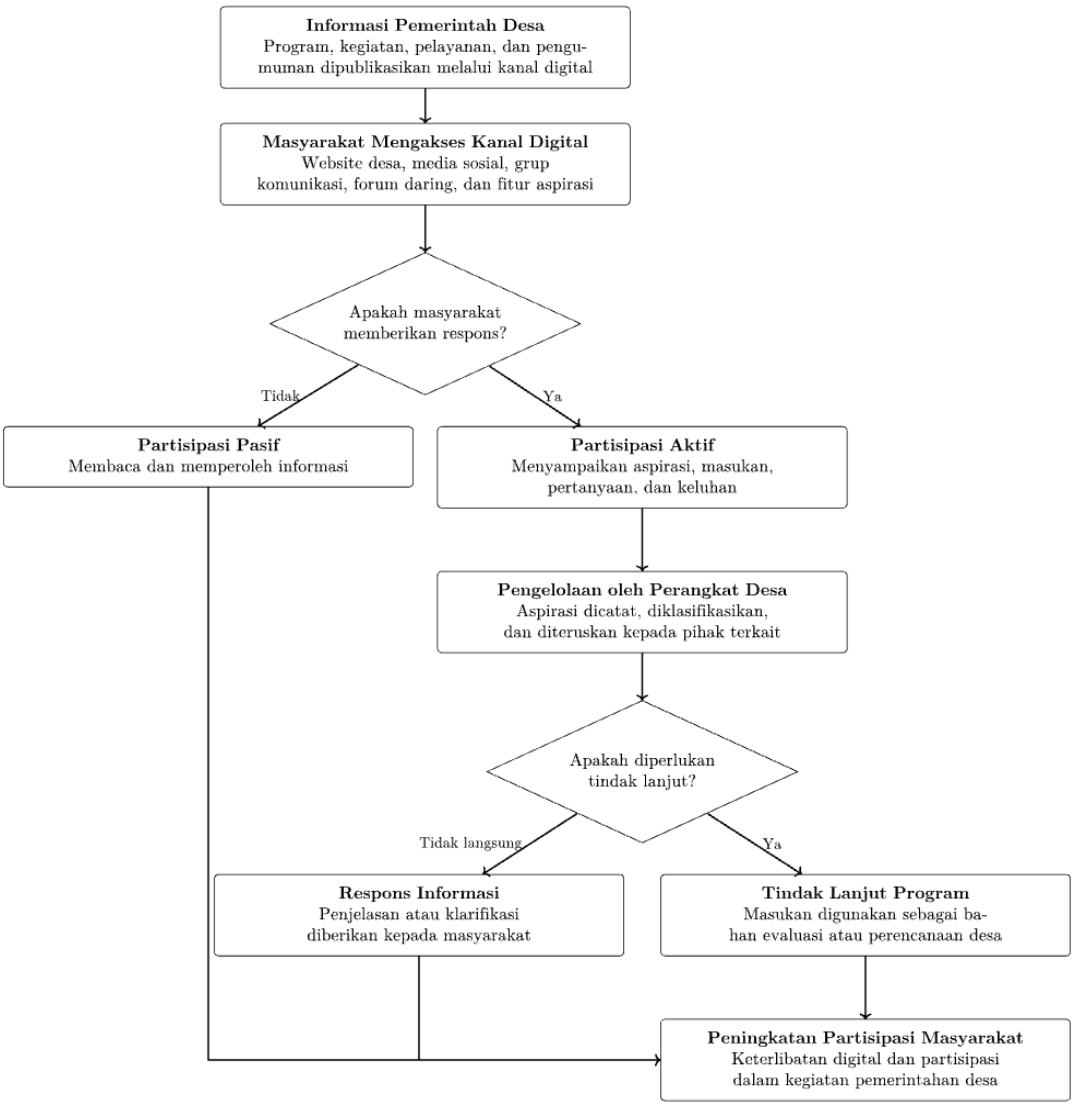
Pemanfaatan kanal digital juga menghasilkan perubahan pola komunikasi. Sebelum optimalisasi kanal digital, interaksi masyarakat dengan pemerintah desa lebih bergantung pada pertemuan langsung. Setelah kegiatan dilaksanakan, masyarakat memperoleh alternatif komunikasi yang dapat digunakan tanpa harus selalu hadir secara fisik. Perbandingan pola komunikasi sebelum dan setelah kegiatan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Pola Komunikasi Sebelum dan Setelah Pemanfaatan Kanal Digital

Aspek	Sebelum	Setelah
Media informasi	Pertemuan dan penyampaian langsung	Website, media sosial, grup digital
Penyampaian aspirasi	Dominan secara langsung	Dapat dilakukan melalui kanal digital
Waktu komunikasi	Bergantung waktu pertemuan	Lebih fleksibel
Dokumentasi aspirasi	Terbatas	Dapat terdokumentasi secara digital
Jangkauan komunikasi	Terbatas pada masyarakat yang hadir	Lebih luas
Interaksi	Cenderung satu arah	Lebih bersifat dua arah

2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/Kontribusi.v7i1.1000

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi dapat mengurangi hambatan komunikasi yang berkaitan dengan waktu dan kehadiran fisik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui beberapa kanal yang tersedia, sedangkan perangkat desa memiliki kesempatan untuk mengelola dan mendokumentasikan masukan secara lebih sistematis.



Gambar 5. Alur Partisipasi Masyarakat melalui Kanal Digital

Gambar 5 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui kanal digital berlangsung secara bertahap, dimulai dari penyampaian informasi oleh pemerintah desa, akses masyarakat terhadap informasi, hingga munculnya respons masyarakat dalam bentuk aspirasi, masukan, pertanyaan, atau keluhan. Aspirasi yang diterima kemudian dikelola oleh perangkat desa melalui proses pencatatan, klasifikasi, dan tindak lanjut. Proses tersebut memungkinkan partisipasi digital berkembang dari sekadar akses informasi menjadi keterlibatan yang lebih aktif dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan desa. Pola ini sejalan dengan hasil kegiatan yang menunjukkan

Kontribusi, Vol.7 No.1 November 2026
ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

peningkatan masukan melalui kanal digital sekitar 70% serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rapat desa dari 45% menjadi 78%.

D. Kemudahan Penyampaian Aspirasi

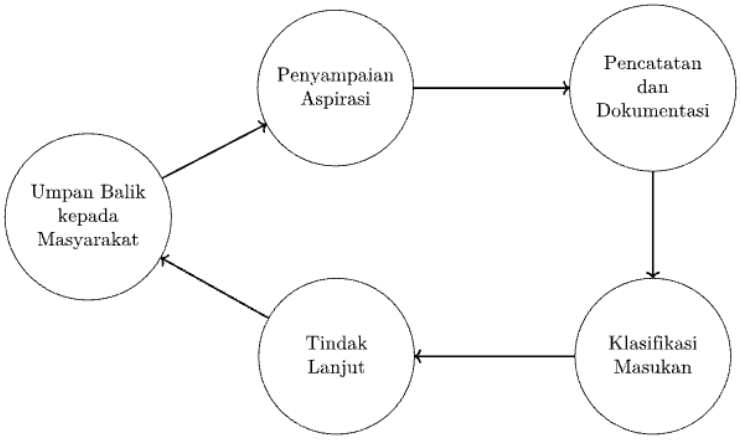
Kemudahan akses merupakan salah satu hasil penting kegiatan. Sebanyak 82% responden menyatakan bahwa mereka lebih mudah menyampaikan pendapat dan keluhan kepada pemerintah desa setelah adanya kanal digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dapat dikurangi ketika masyarakat memiliki alternatif selain komunikasi tatap muka. Kanal digital memberikan ruang kepada warga yang tidak dapat hadir dalam pertemuan desa untuk tetap menyampaikan aspirasi. Capaian kegiatan berdasarkan dimensi partisipasi tersebut dirinci pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kegiatan Berdasarkan Dimensi Partisipasi

Dimensi	Indikator	Capaian
Akses komunikasi	Kemudahan penyampaian aspirasi	82% responden merasa lebih mudah
Keterlibatan digital	Penyampaian masukan melalui kanal digital	Meningkat sekitar 70%
Partisipasi langsung	Kehadiran dalam rapat desa	45% menjadi 78%
Komunikasi dua arah	Interaksi masyarakat dan perangkat desa	Meningkat
Tata kelola partisipatif	Masukan masyarakat digunakan dalam proses desa	Mulai berkembang

Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan tercermin dari dua hal: meningkatnya jumlah interaksi digital dan meluasnya keterlibatan masyarakat pada proses tata kelola desa. Hasil PkM ini sejalan dan didukung oleh temuan evaluasi program smart village di Desa Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan bahwa optimalisasi kanal digital turut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat desa (Huda et al., 2025).



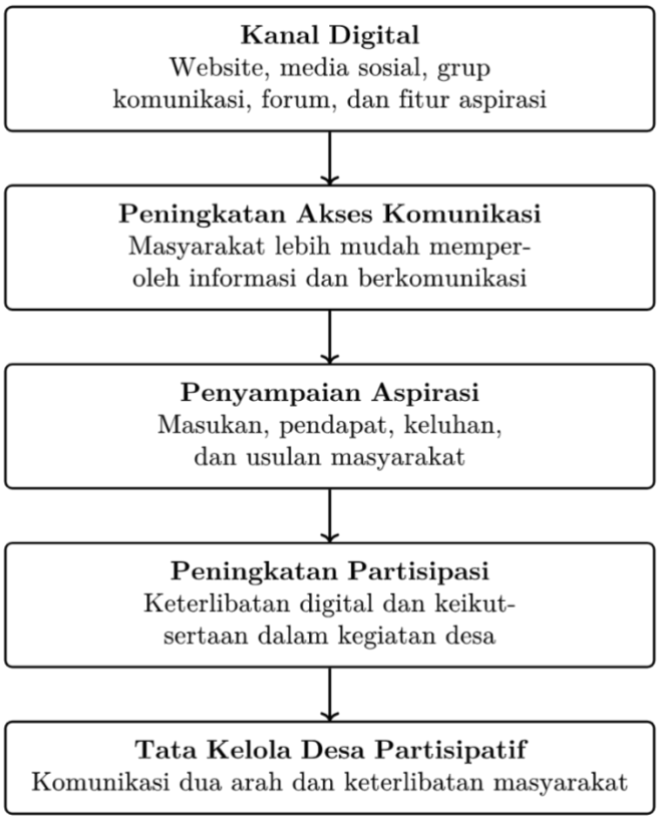
Gambar 6. Siklus Aspirasi Masyarakat

2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/Kontribusi.v7i1.1000

Gambar 6 menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat melalui kanal digital perlu diproses secara berkelanjutan: diterima, dicatat, diklasifikasikan, ditindaklanjuti, dan diberi umpan balik kepada masyarakat. Siklus ini memastikan kanal digital berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus bagian dari mekanisme tata kelola desa.

E. Hubungan Kanal Digital dan Tata Kelola Partisipatif

Pemanfaatan kanal digital menciptakan alur komunikasi yang lebih terstruktur antara masyarakat dan pemerintah desa. Informasi disampaikan melalui kanal digital, masyarakat memberikan tanggapan atau aspirasi, perangkat desa mendokumentasikan masukan, dan masukan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atau penyusunan program desa.



Gambar 7. Model Pemanfaatan Kanal Digital dalam Tata Kelola Partisipatif

Gambar 7 memperlihatkan bahwa kanal digital berfungsi sebagai titik awal untuk memperluas akses komunikasi. Kemudahan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, yang selanjutnya dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses pemerintahan desa. Hasil kegiatan sebelumnya juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai berperan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan melalui kanal digital, sedangkan perangkat desa dapat mengelola masukan masyarakat sebagai salah satu bahan penyusunan program prioritas desa.

Kontribusi, Vol.7 No.1 November 2026
ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

F. Implikasi terhadap Tata Kelola Desa

Pemanfaatan kanal digital memberikan implikasi terhadap beberapa aspek tata kelola desa, khususnya partisipasi, transparansi, responsivitas, dan dokumentasi komunikasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan bukti empiris pada sejumlah negara Asia yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pemerintahan (Hussain, 2023). Implikasi tersebut dirangkum pada Tabel 6.

Tabel 6. Implikasi Pemanfaatan Kanal Digital terhadap Tata Kelola Desa

Aspek	Implikasi
Partisipasi	Masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk terlibat
Transparansi	Informasi desa lebih mudah diakses
Responsivitas	Aspirasi dan keluhan dapat diterima lebih cepat
Akuntabilitas	Komunikasi dan aspirasi dapat terdokumentasi
Inklusivitas	Masyarakat yang tidak hadir secara langsung tetap dapat berpartisipasi

Implikasi ini menunjukkan bahwa manfaat teknologi tidak berhenti pada aspek administratif. Ketika digunakan sebagai media komunikasi dua arah, teknologi juga mendukung proses tata kelola yang lebih partisipatif.

G. Keterbatasan dan Pengembangan Selanjutnya

Meski menunjukkan hasil positif, kegiatan ini punya sejumlah keterbatasan. Evaluasi masih menggunakan pendekatan deskriptif tanpa kelompok pembanding, sehingga perubahan partisipasi belum bisa dijelaskan sebagai hubungan kausal secara penuh. Jumlah dan karakteristik demografis responden masyarakat juga tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumentasi kegiatan terdahulu, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan hati-hati. Keterbatasan dan arah pengembangan selanjutnya dirangkum pada Tabel 7.

Tabel 7. Keterbatasan dan Arah Pengembangan

Keterbatasan	Konsekuensi	Pengembangan Selanjutnya
Tidak menggunakan kelompok kontrol	Pengaruh kausal terbatas	Membandingkan beberapa desa
Data demografis responden belum lengkap	Generalisasi terbatas	Dokumentasi responden secara sistematis
Monitoring masih terbatas	Keberlanjutan belum diketahui	Monitoring jangka panjang
Kualitas aspirasi belum dianalisis	Evaluasi masih berorientasi kuantitas	Analisis isi aspirasi
Perbedaan literasi digital	Penggunaan kanal dapat tidak merata	Pelatihan masyarakat

Pengembangan selanjutnya perlu mengukur kualitas aspirasi, waktu respons pemerintah desa, persentase aspirasi yang ditindaklanjuti, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian aspirasi, bukan sekadar jumlah partisipasi atau interaksi yang terjadi. Arah ini sejalan dengan rekomendasi bahwa keberlanjutan inklusi digital di wilayah perdesaan memerlukan investasi berkelanjutan pada infrastruktur dan program literasi digital yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Doloi, 2025), serta perlunya arah kebijakan yang jelas dalam pengembangan desa digital di negara berkembang, guna mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang transformasi digital secara berkelanjutan (Ikbal et al., 2025).

IV. KESIMPULAN

Pemanfaatan kanal digital dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Mekarbuana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa melalui perluasan akses komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Penggunaan website desa, media sosial, grup komunikasi resmi, forum diskusi daring, dan fitur aspirasi memberi ruang yang lebih fleksibel bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta mengajukan keluhan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kanal digital mendukung keterlibatan masyarakat baik dalam komunikasi daring maupun kegiatan pemerintahan desa, sehingga tujuan kegiatan untuk memperkuat partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi tercapai. Secara kuantitatif, capaian ini tercermin dari kenaikan partisipasi rapat desa dari 45% menjadi 78%, peningkatan penyampaian masukan melalui kanal digital sekitar 70%, serta 82% responden yang menyatakan lebih mudah menyampaikan aspirasi.

Pemanfaatan kanal digital ini perlu dilanjutkan melalui pengelolaan yang konsisten, responsif, dan terintegrasi dengan mekanisme perencanaan serta evaluasi pembangunan desa. Pemerintah desa disarankan memperkuat sistem pencatatan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat, menjaga keberlanjutan pengelolaan kanal komunikasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar partisipasi berlangsung lebih merata. Kegiatan selanjutnya bisa diarahkan pada evaluasi jangka panjang, pengukuran kualitas aspirasi, kecepatan respons pemerintah desa, serta tingkat penyelesaian masukan masyarakat, untuk memperkuat efektivitas tata kelola desa yang partisipatif. Model pendampingan ini juga berpotensi direplikasi pada desa lain di Kabupaten Karawang yang memiliki karakteristik partisipasi masyarakat serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Anas, A., Arifin, I., Irwan, A. L., & Ansar, M. C. (2024). The application of e-government in the development of village government democracy in Gowa Regency, Indonesia. Jurnal Publisitas, 10(2), 173–185. https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.420

Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. Sustainability, 15(11), 8616. https://doi.org/10.3390/su15118616

Astawa, I. W., Wirata, G., & Sulandari, S. (2026). Digital public participation and responsive governance in village development planning. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 14(1), 653–662. https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4687

Dirgatama, C. H. A., Permansah, S., & Rusmana, D. (2024). Understanding smart village concepts: Digital literacy and mobile technology. Journal of Education and Learning (EduLearn), 18(3), 1015–1028. https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i3.21293

ISSN: 2747-2027 (Print) / 2747-2035 (Online)
DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.1000

Doloi, H. K. (2025). Digital inclusion for rural growth: Internet usage and smart villages development. Asia-Pacific Journal of Rural Development, 35(1), 40–57. https://doi.org/10.1177/10185291251343357

Endah, K., Juliarso, A., Nursetiawan, I., & Mom, A. (2026). Implementation of smart villages based on local community participation within a digital governance framework in Indonesia and Malaysia. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 10(7), 10145–10152. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.100700688

Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(3), 516–538. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15891

Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. World Development Sustainability, 3, 100089. https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089

Heryana, N., & Mayasari, R. (2026). Pelatihan perangkat desa untuk mewujudkan Good Village Government berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Abdimas Nusa Mandiri, 8(1), 1–10. https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i1.5038

Hlaváček, P., Kopáček, M., Kopáčková, L., & Hruška, V. (2023). Barriers for and standpoints of key actors in the implementation of smart village projects as a tool for the development of rural areas. Journal of Rural Studies, 103, 103098. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103098

Huda, N., Subandi, E., Junadi, Suhindarno, H., & Huda, M. M. (2025). Evaluasi program Smart Village Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. JIAN: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 9(2), 190–203. https://doi.org/10.56071/jian.v9i2.1252

Hussain, A. (2023). ICT-driven transparency: Empirical evidence from selected Asian countries. Journal of Telecommunications and the Digital Economy, 11(3), 19–41. https://doi.org/10.18080/jtde.v11n3.658

Ikbal, M., Erfina, Lawelai, H., Lubis, S., & Darlis, M. A. A. (2025). Digital transformation in rural areas: Directions for digital village development in developing countries. Journal of Public Sector Innovations, 9(2), 58–72. https://doi.org/10.26740/jpsi.v9n2.p58-72

Manapa Sampetoding, E. A., & Er, M. (2024). Digital transformation of smart village: A systematic literature review. Procedia Computer Science, 239, 1336–1343. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.304

Mutiarin, D., & Iqbal, M. (2021). Smart village governance: Citizen participation in Panggungharjo Village-Owned Enterprise. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 10(2), 181–195. https://doi.org/10.31314/pjia.10.2.181-195.2021

Nazriana, R., Ramadhanie, L. P., Meira, S., Mufaza, H. S., & Santia, I. (2026). Manggis Smart Village: Manifestasi Kombinasi Transformatif PPK Ormawa HIMAPTIKA dalam Pemberdayaan Desa Manggis. Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 58–69. https://doi.org/10.53624/kontribusi.v7i1.840

Oktarina, A., Pertiwi, C., Paluseri, A. R. A., Fazri, M., Nababan, F. E., Roidatua, M. R., & Imron, D. K. (2023). Smart governance in Indonesian village towards SDGs achievement. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 8(1), 107–122. https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.39168

Putra, F. (2023). Village governance and public participation in Indonesia. Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study, 3(2), 55–64. https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02

Renukappa, S., Suresh, S., Abdalla, W., Shetty, N., Yabbati, N., & Hiremath, R. (2024). Evaluation of smart village strategies and challenges. Smart and Sustainable Built Environment, 13(6), 1386–1407. https://doi.org/10.1108/SASBE-03-2022-0060

Rodiyah, I., Mursyidah, L., & Rustianingsih, E. (2025). E-government governance through SID from a good governance perspective: Study of Sugihwaras Village Government. JKMP: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 13(2). https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i2.1959

Saadah, M. A., Yanti, O., Setiawan, W. J., Syeftiani, T., Permana, K., Hendriyaldi, H., & Haris, M. (2026). Building smart village governance beyond technology: Evidence from a participatory action research on OpenSID implementation in Indonesia. Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 7(1), 1–13. https://doi.org/10.33394/jpu.v7i1.18877

Sihotang, D. M., Purwandari, B., Eitiveni, I., Putri, M. F., & Hidayanto, A. N. (2023). Factors influencing village information systems adoption in Indonesia: A qualitative study. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 89(5), e12271. https://doi.org/10.1002/isd2.12271

Sisephaputra, B., Suroni, A., Islam, K., Yahya, S., Nashihin, D., Al Rosyid, H., Orvala, F., Putra, D. S., & Pratama, T. R. (2025). Peningkatan Promosi Desa Wisata Soco Melalui Digitalisasi Objek Wisata dan Edukasi Komunitas. Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 164–172. https://doi.org/10.53624/kontribusi.v6i1.747

Susilowati, A. P. E., Rachmawati, R., & Rijanta, R. (2025). Smart village concept in Indonesia: ICT as determining factor. Heliyon, 11(1), e41657. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41657

Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal. (2022). E-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003–2020. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 3(1), 37–53. https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.27

Yaya, R., & Sukardi, S. (2025). Pengaruh implementasi e-government dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dengan good government governance sebagai variabel pemoderasi. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 10(1), 69–81. https://doi.org/10.32502/balance.v10i1.600